

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam GBHN 1993 dikatakan bahwa pembangunan aparatur negara pada hakekatnya merupakan pendayagunaan dan pembinaan keseluruhan unsur sistem administrasi negara. Usaha tersebut meliputi : penataan organisasi, penyempurnaan ketatalaksanaan, pemantapan sistem manajemen dan perbaikan sarana dan prasarana.

Oleh karena semua kegiatan diatas dilaksanakan oleh manusia, maka penyempurnaan dibidang manajemen harus diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia yang handal. Dengan demikian pada akhirnya diharapkan terwujudnya aparatur yang memiliki disiplin, profesional dan semangat pengabdian yang tinggi terhadap masyarakat, bangsa, tanah air dan negara.

Untuk mencapai sasaran diatas, maka dirumuskan berbagai kebijaksanaan yang antara lain meningkatkan disiplin aparatur negara dan pengawasan dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa di tengah-tengah masyarakat.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas demokrasi dan keterbukaan di segala bidang merupakan suatu tantangan bagi aparatur negara. Keterbukaan dimaksud tidak hanya terbatas pada bidang politik dan ekonomi, tapi juga pada bidang administrasi negara.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan dana yang cukup besar yang antara lain digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun belanja pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya menjadi alat kebijaksanaan ekonomi pemerintah tetapi juga menjadi kekuatan legal alat pelaksanaan kegiatan serta pengawasan yang baik dalam negara demokrasi oleh karena APBN tersebut mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam APBN terdapat unsur penerimaan dan unsur pengeluaran negara. Untuk penerimaan negara dapat dikelompokkan atas penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam serta penerimaan

diluar minyak bumi dan gas alam, sedangkan penerimaan luar negeri terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek.

Sedangkan Belanja atau Pengeluaran menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Unsur pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan modal sendiri telah mengacu semua pihak untuk selalu meningkatkan besarnya tabungan pemerintah dari tahun ketahun yang merupakan selisih lebih penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin.

Untuk mendukung pembangunan nasional telah diambil kebijaksanaan dengan menetapkan besarnya tabungan pemerintah. Dengan adanya kebijaksanaan tersebut menyebabkan alokasi anggaran belanja pada masing-masing departemen/lembaga menjadi sangat terbatas.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan administrasi yang baik dan benar dalam penyaluran anggaran. Hal ini dapat berwujud bila masing-masing pihak terkait dapat memahami dan melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku, baik bendaharawan gaji yang telah ditunjuk oleh pejabat berwenang sebagai pengelola keuangan suatu instansi.

Dalam administrasi yang baik segala hambatan dalam proses pembangunan nasional akan dapat diatasi, apalagi dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan persaingan serta perubahan-perubahan yang terjadi begitu pesat sekali, maka sangat diperlukan pengelola keuangan negara yang dapat diharapkan mampu mengatasi masalah yang berhubungan dengan administrasi.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis merasa tertarik mengambil judul tentang "Administrasi Keuangan Belanja Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Propinsi Sumatera Barat".

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalahnya :

Berapa rencana dan realisasi belanja Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014.

Bagaimana bentuk pengawasan yang dilaksanakan dalam pembukuan Belanja Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat.

Apa kendala yang dihadapi dalam pembukuan Belanja Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui berapa rencana dan realisasi belanja Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mengetahui bagaimana Bentuk pengawasan yang dilaksanakan dalam pembukuan Belanja Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Untuk mengetahui apa Kendala yang dihadapi dalam pembukuan Belanja Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat.

#### **Manfaat**

Penelitian mengenai Administrasi Keuangan Belanja Daerah adalah penelitian yang jarang diangkat pada program studi diploma keuangan negara. Manfaat yang ingin dicapai penulis dengan melakukan penelitian ini adalah :

Mengetahui secara kongkrit bagaimana Administrasi Keuangan Belanja Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memahami bagaimana administrasi yang mampu dihasilkan dari Keuangan Belanja Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memberi sebuah pengetahuan secara aplikatif yang bisa didapatkan oleh penulis dengan cara turun langsung untuk melihat bagaimana administrasi yang dilakukan

#### **1.4 Tempat dan waktu magang**

Dalam pelaksanaan magang ini saya sebagai penulis memilih tempat magang yaitu pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 40 hari kerja.

#### **1.5 Sistematika penulisan**

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Didalam bab ini diuraikan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan.

##### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang Administrasi Keuangan Belanja Pegawai. Serta bagaimana administrasi yang mampu dihasilkan dari pembagian belanja pegawai.

##### **BAB III: GAMBARAN UMUM KOTA PADANG DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Dalam bab ini membahas gambaran umum kota Padang dan gambaran umum Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, tujuan, sasaran, perencanaan strategis dan struktur organisasi.

##### **BAB IV : ANALISIS ADMINISTRASI KEUANGAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Merupakan pembahasan tentang Administrasi Keuangan Belanja Daerah pada Dinas pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

##### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

##### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **LAMPIRAN**

##### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

